

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Dwi Sapartiningsih ¹⁾

Suharno ²⁾

Djoko Kristianto ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ dwi.sapartiningsih@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the significance of the influence of the competence of human resources, utilization of information technology, budgeting and monitoring participation against the accountability of the management of the village Fund at the Government Village in district Sumberlawang Kabupaten Sragen. Populations and samples in this study are all parties involved in the preparation of ABBDes at the Government village in sub-district of Sumberlawang Sragen district of 77 people, so this research is the study of the census. Methods of data collection were used: questionnaire and documentation. Technique of data analysis used the test of validity, reliability test, test the assumptions of classical, and multiple linear regression analysis, t-test, F-test and coefficient of determination. The research results obtained the conclusion that there is a significant positive influence on the competence of the human resources management accountability against the village Fund. There is a significant positive influence on the utilization of information technology fund management accountability towards the village. There is a significant positive influence on participation in budgeting management accountability against the village Fund. There is a significant positive influence on the supervision of fund management accountability towards the village.

Keywords: *competence of human resources, utilization of information technology, budgeting participation, oversight, accountability of managing the village Fund.*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan dana desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa. Arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (*Musrenbangdes*), oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Fakta di lapangan selama ini pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai dana Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan pemerintahan, hal itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang bekepentingan (masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan.

Nordiawan (2006: 35) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Kompetensi sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien: (Hullah, 2012: 11). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup: pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Hal ini berarti semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), Megawati (2015) serta Sugiarti

dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Menurut Suparman (2014: 3) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan.

Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa terutama di desa-desa di empat wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penjelasan di atas juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain faktor sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor partisipasi penganggaran juga merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Sujarweni (2015: 29) mengatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Hasil observasi awal pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari secara rutinnya setiap seminggu sekali aparatur desa selalu mengadakan acara minggon (rapat rutin mingguan) yang dihadiri oleh seluruh aparatur desa, para sesepuh desa, kepala dusun, serta RT (Rukun Tetangga) di setiap dusunnya untuk mengevaluasi setiap anggaran yang akan diajukan untuk anggaran dana desa tahun selanjutnya serta mengevaluasi anggaran yang telah dilaksanakan. Rapat minggon ini tidak hanya diselenggarakan oleh pihak desa saja. Setiap dua minggu sekali pihak kecamatanpun rutin melakukan rapat minggon guna menunjang kebiasaan para aparatur desa untuk bersikap terbuka jujur dalam melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap desa. Selain kecamatan, pihak kabupaten pun selalu rutin melaksanakan rapat minggon setiap tiga minggu sekali atau sebulan sekali yang biasanya dilaksanakan di pelataran balai kabupaten. Di mana rapat ini tidak hanya dihadiri oleh para aparatur pemerintahan saja tetapi juga dihadiri oleh dinas-dinas terkait yang sedang menjalankan suatu program dan juga masyarakat umum sebagai sarana publikasi hasil kinerja aparatur pemerintahan. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi

suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Anggraeni, 2014: 7). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) yang meneliti mengenai analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perbedaan penelitian ini dengan Sugiarti dan Yudianto (2017) yaitu terletak pada lokasi penelitian serta penambahan variabel pengawas sebagai variabel independen. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen yang terdiri dari 11 desa, sedangkan dalam penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) lokasi penelitiannya adalah desa di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

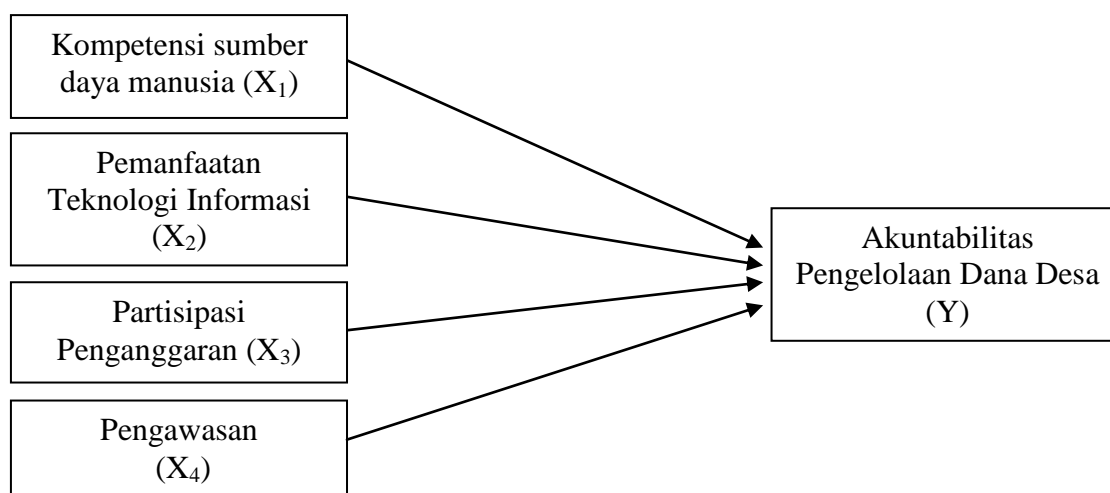
Alasan peneliti melakukan penelitian kembali mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena di wilayah Kabupaten Sragen terdapat 21 desa yang dilaporkan ke polisi karena pengelolaan dana desanya (DD) terindikasi menyimpang dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indikasi penyimpangan tersebut berupa penggelembungan anggaran (*mark-up*) dan pembelanjaan fiktif, menjadi modus paling banyak dilaporkan (Joglosemar, Edisi 27 Oktober 2017).

Selain itu berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen ada berbagai permasalahan terkait pengelolaan dana desa di tingkat Desa yaitu dalam hal pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan misalnya terkait ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dana desa, ketidaksesuaian format yang ditetapkan, serta dinilai belum sesuai target sasaran program dana desa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan program dana desa tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 2) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 3) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 4) Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi, berikut disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Karangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan.
2. Variabel Dependen (Terikat)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

HIPOTESIS

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah, 2012: 11). Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup: pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Hal ini berarti semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), Megawati (2015) serta Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa terutama di desa-desa di empat wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan

keuangan pemerintah desa. Sehingga aparat desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain itu, peraturan Bupati Karawang mengenai setiap desa wajib memiliki perangkat komputer minimal dua buah mengharuskan setiap desa harus paham mengenai tata cara penggunaannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Ada pengaruh yang positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

3. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Sujarweni (2015: 29) mengatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ada pengaruh yang positif signifikan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

4. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Ada pengaruh yang positif signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ABBDes pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen yang berjumlah 77 orang, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 77 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sensus. Metode pengumpulan data yang digunakan: kuesioner dan dokumentasi. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan perangkat desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya

untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Indikator kompetensi sumber daya manusia adalah:

- a. Keterampilan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi
 - b. Pengetahuan pegawai mengenai pengelolaan dana desa
 - c. Pengetahuan pegawai mengenai penyusunan anggaran dana desa
 - d. Pengetahuan pegawai mengenai siklus akuntansi
 - e. Keahlian dalam menyusun dan menyajikan laporan Dana Desa
 - f. Pernah mengikuti pelatihan penatausahaan laporan keuangan dana desa
 - g. Mengedepankan etika dan kode etik sebagai perangkat desa
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu:
- a. Penggunaan *software* aplikasi
 - b. Proses akuntansi secara komputerisasi
 - c. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
 - d. Pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik
 - e. Pegawai dapat memanfaatkan keunggulan komputer dalam menginput data secara cepat
3. Partisipasi Penganggaran
- Partisipasi penganggaran adalah seberapa jauh keterlibatan masyarakat desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen dalam proses penyusunan APBDes. Indikator partisipasi penganggaran yang diukur dengan indikator:
- a. Peranan masyarakat terhadap penyusunan APBDes.
 - b. Peranan perangkat desa dalam penyusunan APBDes.
 - c. Interaksi kepala desa dengan masyarakat dalam penyusunan APBDes.
 - d. Memiliki pengaruh dalam penyusunan APBDes
 - e. Memiliki kontribusi dalam penyusunan APBDes
4. Pengawasan
- Pengawasan adalah tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Indikator pengawasan yang diukur dengan indikator:
- a. Pengawasan penggunaan APBDes
 - b. Pengawasan oleh masyarakat
 - c. Pengawasan secara internal dan eksternal
 - d. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa
 - e. Pengawasan secara preventif dan repreventif
5. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada Bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:
- a. Pengelolaan APBDes disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat
 - b. Pengelolaan APBDes melibatkan semua unsur-unsur masyarakat
 - c. Penyajian APBDes disertai informasi periode sebelumnya
 - d. Pertanggungjawaban APBDes disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat
 - e. Proses pengawasan APBDes dilakukan secara terus menerus

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson, kriteria pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Butir instrumen dinyatakan valid jika menghasilkan $p\text{ value} < 0,05$. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, dengan kriteria pengujian apabila *Cronbach Alpha* $> 0,60$ dinyatakan reliabel, sebaliknya *Cronbach Alpha* $< 0,60$ tidak reliabel.

Teknik analisis data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 21.

2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	54	70,13
	Perempuan	23	29,87
	Jumlah	77	100
Usia	≤ 25	4	5,19
	25 – 50	42	54,55
	> 50	31	40,26
	Jumlah	77	100
Masa Kerja	< 5 Tahun	11	40,29
	5 – 10 Tahun	26	33,77
	> 10 Tahun	40	51,95
	Jumlah	77	100
Tingkat Pendidikan	SMP	7	9,09
	SMA	42	54,55
	D-III	6	7,79
	S-1	22	28,57
	Jumlah	77	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

2. Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil uji validitas instrumen mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	No. Item	<i>p-value</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	1.	0,000	Valid	0,614	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
	6.	0,000	Valid		
	7.	0,000	Valid		
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.	0,000	Valid	0,676	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Partisipasi Penganggaran	1.	0,000	Valid	0,641	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Pengawasan	1.	0,000	Valid	0,633	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1.	0,000	Valid	0,631	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia sebanyak 7 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$., pemanfaatan teknologi informasi sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, partisipasi penganggaran sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, pengawasan sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,614, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,641, partisipasi penganggaran sebesar 0,641, pengawasan sebesar 0,633, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,631 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance: 0,726; 0,752; 0,808; 0,761 > 0,10 VIF : 1,378; 1,329; 1,237; 1,313 < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p: 0,207 > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p: 0,424; 0,322; 0,657; 0,160 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	p: 0,902 > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), partisipasi penganggaran (X_3) dan pengawasan (X_4) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	-4,514	2,434	0,017
Kompetensi SDM	0,176	2,893	0,005
Pemanfaatan TI	0,434	5,868	0,000
Partisipasi penganggaran	0,275	4,248	0,000
Pengawasan	0,270	3,521	0,001

Adjusted R Square = 0,710
F-hitung = 47,563
Sig. F = 0,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = -4,514 + 0,176 X_1 + 0,434 X_2 + 0,275 X_3 + 0,270 X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : -4,514 artinya jika kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), partisipasi penganggaran (X_3) dan pengawasan (X_4) sama dengan nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah negatif sebesar 4,514.
- b_1 : 0,176 artinya pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) positif, artinya apabila kompetensi sumber daya manusia meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2), partisipasi penganggaran (X_3) dan pengawasan (X_4) dianggap tetap.
- b_2 : 0,434 artinya pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) positif, artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, dengan

asumsi variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), partisipasi penganggaran (X_3) dan pengawasan (X_4) dianggap tetap.

b_3 : 0,275 artinya pengaruh variabel partisipasi penganggaran (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) positif, artinya apabila partisipasi penganggaran meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, dengan asumsi variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan pengawasan (X_4) dianggap tetap.

b_4 : 0,270 artinya pengaruh variabel pengawasan (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) positif, artinya apabila pengawasan meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, dengan asumsi variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dan partisipasi penganggaran (X_3) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2), karena nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,434 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (kompetensi sumber daya manusia (X_1) sebesar 0,176, partisipasi penganggaran (X_3) sebesar 0,275, dan pengawasan (X_4) sebesar 0,270).

5. Uji t

a. Pengujian signifikansi pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,893 dengan p -value sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

b. Pengujian signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,868 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

c. Pengujian signifikansi pengaruh partisipasi penganggaran (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,248 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan partisipasi penganggaran (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

d. Pengujian signifikansi pengaruh pengawasan (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,521 dengan p -value sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pengawasan (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

6. Uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 47,563 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), partisipasi penganggaran (X_3) dan pengawasan (X_4) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sudah tepat.

7. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,710 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2), partisipasi penganggaran (X_3) dan pengawasan (X_4) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen sebesar 71% sedangkan sisanya ($100\% - 71\%$) = 29% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,893 dengan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kompetensi sumber daya manusia (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya apabila kompetensi sumber daya manusia meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Kompetensi sumber daya manusia adalah “kemampuan seseorang suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah, 2012: 11).

Kompetensi sumber daya manusia harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Sumber daya manusia mencakup: pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Hal ini berarti semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), Megawati (2015) serta Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,868 dengan p -value sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa terutama di desa-desa di empat wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain itu, peraturan Bupati Karawang mengenai setiap desa wajib memiliki perangkat komputer minimal dua buah mengharuskan setiap desa harus paham mengenai tata cara penggunaannya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Menurut Suparman (2014: 3) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,248 dengan p -value sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan partisipasi penganggaran (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya apabila partisipasi penganggaran meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari secara rutusnya setiap seminggu sekali aparatur desa selalu mengadakan acara minggon (rapat rutin mingguan) yang dihadiri oleh seluruh aparatur desa, para sesepuh desa, kepala dusun, serta RT (Rukun Tetangga) di setiap dusunnya untuk mengevaluasi setiap anggaran yang akan diajukan untuk anggaran dana desa tahun selanjutnya serta mengevaluasi anggaran yang telah dilaksanakan. Rapat minggon ini tidak hanya diselenggarakan oleh pihak desa saja. Setiap dua minggu sekali pihak kecamatanpun rutin melakukan rapat

minggon guna menunjang kebiasaan para aparatur desa untuk bersikap terbuka jujur dalam melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap desa. Selain kecamatan, pihak kabupaten pun selalu rutin melaksanakan minggon setiap tiga minggu sekali atau sebulan sekali yang biasanya dilaksanakan di pelataran balai kabupaten. Di mana rapat ini tidak hanya dihadiri oleh para aparatur pemerintahan saja tetapi juga dihadiri oleh dinas-dinas terkait yang sedang menjalankan suatu program dan juga masyarakat umum sebagai sarana publikasi hasil kinerja aparatur pemerintahan.

Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Sujarweni (2015: 29) mengatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,521 dengan p -value sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pengawasan (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya apabila pengawasan meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Anggraeni, 2014: 7).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi sumber daya manusia, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Ada pengaruh yang positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola

dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Ada pengaruh yang positif signifikan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, artinya apabila partisipasi penganggaran meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Ada pengaruh yang positif signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, artinya apabila pengawasan meningkat maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Tri. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 3. Hal. 1-16.
- Djarwanto Ps dan Pangestu. Subagyo. 2006. *Statistik Induktif*. BPFE. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hansen dan Mowen, 2009. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*. Volume 2, Nomor 1. Hal. 15-30.
- Hullah, Abdurahman Rigel. 2012. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 3. No 2. Hal. 9-21.
- Joglosemar. 2017. Masyaallah, 21 Kades di Sragen Dilaporkan Polisi karena Terdeteksi Selewengkan Dana Desa. Edisi 27 Oktober 2017.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mahayani, Ni Luh Ayu. 2017. Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 12, No. 2. Hal. 129-144.
- Megawati, Luh Kadek Sri. 2015. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)." *e-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 3 No. 1. Hal. 1-11.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama. Bandung.
- Sujarweni, Wiranata. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sugiarti, Ekasari dan Ivan Yudianto 2017. "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Proceedings*.
- Suparman, Wayan Edi. 2014. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng." *e-Journal SI Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2. No. 1. Hal. 1-10.
- Widyatama, Arif, Lola Novita dan Diarespati. 2017. "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)." *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 02, No. 02. Hal. 1-20.